

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHENTIKAN KERJASAMA  
PERTAHANAN SEMENTARA DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2016 (STUDI  
KASUS: JOINT TRAINING AND MILITARY OPERATION INDONESIAN  
ARMED FORCES DAN AUSTRALIAN DEFENSE FORCES)**

Oleh:

**Juli Fetra Alfin <sup>1</sup>**

**(Julifetraalfin@gmail.com)**

**Pembimbing : Syafri Harto, S.Ip, M.Si**

**Bibliografi : 3 Jurnal dan/atau Working Papers, 15 Buku, 2 Dokumen dan  
Laporan Resmi, 2 Tesis, 1 Skripsi 9 Situs Web**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The purpose of this research is to understand This research will discuss about why Indonesian stopping defense cooperation temporary against Australian. In the last 2016, Indonesian Government based Ministry of Defense agree to stop defense cooperation against Australian. It is between Indonesian Armed Forces by Kopasus and Australian Defense Forces, both Joint training, joint military operation temporary stopped as a respon to an issue of humiliat of Pancasila by Australian Defense Forces.*

*This research theoretically has built with Realism perspectives on International Relations and supported by Foreign Policy theory of James N.Rossenau. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.*

*Researcher has formulated answered-hypothesis whic reveals the fact that Indonesian foreign policy that stopping a defense cooperation temporary just caused by a bad relation between countries that always on conflict. It is caused a confidence building measure too. There is nothing a mutual trust each other. Australy been always look Indonesia as a threat from North. So, that's make sense when Australy was always countering Indonesia as a threat not a companion.*

**Keywords : Foreign Policy, Indonesia, Australia, Defense Cooperation, Joint Training, Joint Military Operation, Indonesian Armed Forces, Australian Defense Forces**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

## I. Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang menghentikan kerjasama pertahanan dengan Australia pada tahun 2016. Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai motivasi Indonesia menghentikan kerjasama pertahanan dengan negara yang dikenal dekat dengan Indonesia tersebut.

Sesuai dengan kepentingan pertahanan negara, Indonesia juga melakukan kerjasama dibidang pertahanan dengan negara lain yang dilakukan sebagai upaya demi mewujudkan kepentingan nasional tersebut. Kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun nonmateril), dan pengontrolan senjata (arms control).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara harus senantiasa melakukan optimalisasi terhadap diplomasi pertahanan yang dilaksanakan agar selaras dengan ancaman dan tantangan yang berkembang. Terkait dengan hal tersebut, kerjasama pertahanan Indonesia hendaknya dapat memainkan peran lebih besar dan konstruktif di kawasan dalam rangka memproyeksikan kepentingan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah terobosan untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan, yakni melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertahanan, peningkatan

kemampuan alutsista pertahanan dan terlaksananya evaluasi kebijakan pertahanan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan ketika kini atmosfer kerjasama pertahanan di kawasan lebih mengedepankan kerjasama pertahanan multilateral daripada kerjasama pertahanan bilateral belaka.

Indonesia membuka kerjasama dengan negara manapun yang dianggap sebagai negara yang penting untuk diajak kerjasama terlebih dalam bidang pertahanan. Tidak terkecuali negara terdekat dengan Indonesia seperti negara-negara di Asean dan Australia sekalipun. Australia merupakan negara persemakmuran Inggris yang berdekatan dengan wilayah Indonesia.

Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik, dikarenakan dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda diantara keduanya dalam satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan diantara kedua negara tersebut. Disisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan kerenggangan diantara kedua negara tersebut. Pasang surut hubungan bilateral kedua antara kedua negara ini lah yang dikatakan sebagai hubungan yang unik. Sebenarnya hubungan baik Indonesia dan Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia dimana Australia sebagai salah satu negara yang bersimpati dan mendukung status kemerdekaan Indonesia di kalangan Internasional<sup>3</sup>

Pada saat Australia dibawah kepemimpinan John Howard yang mana pada era ini Australia justru memperkeruh hubungan bilateral antar kedua negara. Hal ini terlihat dari

---

<sup>2</sup> Wolfgang Koerner, "Security Sector Reform: Defence Diplomacy" (Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament), 2006

---

<sup>3</sup> Anthony Reid & Martin O'Hare, 1955. *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: PT Hramedia Pustaka Utama. Hlm 2

bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor-timur, serta kasus Irian Barat. Kasus terorisme di Indonesia juga justru menimbulkan kecurigaan Australia terhadap Islam di Indonesia, ditambah dengan kasus pemberian visa kepada warga negara Papua merupakan tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas kedua negara.

Pada tahun 2013, hubungan Indonesia dan Australia menunjukkan ketidakstabilan setelah kapal perang Australia masuk perairan Indonesia. Kemudian Australia kembali berulah aparat Australia dilaporkan membayar awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke perairan Indonesia. hal ini dilakukan oleh Angkatan Laut Australia dengan mencegat kapal pengangkut pengungsi dengan memberikan sejumlah uang untuk kembali ke Indonesia masing-masing awak US\$ 5000.<sup>4</sup>

Ketegangan semakin memperburuk keadaan Indonesia dan Australia ketika Australia tertangkap telah menyadap percakapan telepon sejumlah Pejabat di Indonesia termasuk Ibu Negara Indonesia pada tahun 2013. Untuk itu, pada kesempatan tersebut melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memberikan respon negatif melalui kebijakannya menghentikan setiap hubungan dan kerjasama dengan Australia saat itu termasuk bidang pertahanan. Kerjasama yang sementara dihentikan adalah tiga kegiatan kerja sama utama yang membutuhkan mutual trust (saling percaya).<sup>5</sup> Atas kasus tersebut nyatanya

---

<sup>4</sup> AL Australia Bayar awak perahu migran, Abbot tidak bantah. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150612\\_dunia\\_abbott\\_pengungsi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150612_dunia_abbott_pengungsi) diakses pada 29 Januari 2017 Pukul 21:26 Wib

<sup>5</sup> TNI hentikan kerja sama militer dengan Australia, dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia)

Pemerintahan Australia menganggap remeh Indonesia dengan tidak menanggapinya lebih lanjut. Maka dari itu, Indonesia seharusnya mengkaji ulang kepentingan bekerjasama dengan Australia.<sup>6</sup>

Krisis saat ini seharusnya dipandang sebagai sinyal bahwa Indonesia bisa bertindak keras dan tegas bila harga diri dan kedaulatan yang menjadi taruhan. Setiap komponen bangsa perlu mendukung sikap pemerintah agar Indonesia tidak dijadikan konsumsi politisi Australia untuk kepentingan mereka. Tindakan tegas pemerintah atas Australia akan menunjukkan kekesalan Indonesia selama ini terhadap politisi dan elite Australia.<sup>7</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan kompleksitas masalah-masalah antar negara-negara saat ini. Hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik, kerjasama pun kemudian mencair kembali seperti *joint operation, joint training* antar angkatan bersenjata Indonesia – Australia. Beberapa kesepakatan bersama terkait upaya meningkatkan dan memperkuat hubungan kedua negara dalam kerjasama luar negeri dan kerjasama pertahanan diantaranya kerjasama di bidang keamanan maritim, kerjasama kontra terorisme, kerjasama di bidang pasukan penjaga perdamaian, kerjasama

---

[/2013/11/131121\\_kemenhan\\_kerjasama\\_militer\\_dihentikan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131121_kemenhan_kerjasama_militer_dihentikan) diakses pada 29 Januari 2017 Pukul. 21:59 Wib

<sup>6</sup> *Indonesia Kaji Ulang Kerjasama dengan Australia*, dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131119\\_sbyreviewoz](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131119_sbyreviewoz) diakses pada 29 Januari 2017 Pukul. 22:05 Wib

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwana, *Krisis hubungan Indonesia – Australia*, Guru Besar Hukum Internasional FHUI, dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/31/opini/2545925.htm> diakses pada 30 Januari pukul 09:30 Wib

industri pertahanan dan kerjasama di bidang keamanan cyber.<sup>8</sup>

Pada akhir 2016, kerjasama pertahanan seperti pertukaran pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan Indonesia di Australia menemukan substansi dari bahan ajaran di sekolah Australia yang menjelek-jelekan serta menghina Indonesia. hal ini kemudian menjadi masalah yang cukup besar bagi kedua negara. Indonesia melalui kerjasama TNI dan *Australian Defence Force* sementara menghentikan segala urusan kerjasama antar negara.<sup>9</sup>

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia melalui *joint military operations* atau *joint training* telah dilakukan sejak lama antara TNI dan ADF (*Australian Defense Forces*). Menyikapi penghinaan tersebut, TNI mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Sementara itu, dalam Surat Telegram Nomor 1545 Tahun 2016 pada 29 Desember 2016, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk menghentikan sementara segala kerja sama militer, termasuk latihan dengan ADF. Telegram Panglima TNI yang ditandatangani Asisten Operasi

Panglima TNI menindaklanjuti surat Panglima TNI pada 9 Desember 2016 tentang penghentian sementara kegiatan kerja sama militer ADF dan TNI tersebut.<sup>11</sup>

Buruknya hubungan antara Indonesia dan Australia nyatanya membuat Presiden Jokowi menunda kunjungan kenegaraannya ke Australia oleh karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Untuk itu, setelah terjadi *clash* yang berulang-ulang dengan Australia bagaimana sikap Indonesia menghadapi krisis tersebut. Kejadian yang terakhir dengan Australia bukan suatu kasus yang besar seperti upaya ancaman-ancaman Australia yang lainnya.

Dari latar belakang masalah ini kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian “**Mengapa Indonesia Menghentikan Kerjasama Pertahanan Sementara Dengan Australia Tahun 2016 (Studi Kasus: Joint Training And Military Operation Indonesian Armed Forces Dan Australian Defense Forces)?**”

### **Kerangka Teori**

Kerangka dasar diperlukan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat sebagai analisa terhadap penelitian. Pada kerangka teori, akan dibahas mengenai Perspektif, Tingkat Analisa, Konsep, dan teori sehingga menunjang penelitian untuk menjawab hipotesa penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian.

### **Perspektif**

Penulis menggunakan Perspektif Realisme, memandang kepentingan

---

<sup>8</sup> *Indonesia – Australia bahas Kerjasama Bilateral*, dalam <https://www.kemhan.go.id/2016/10/28/indonesia-a-australia-bahas-peningkatan-kerjasama-bilateral.html> diakses pada 29 Januari 2017 Pukul. 19:10 Wib

<sup>9</sup> *Apakah Tepat langkah TNI bekukan kerjasama militer dengan Australia*, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38509431> diakses pada 29 Januari 2017 Pukul. 22:41 Wib

<sup>10</sup> *TNI Tunda Kerjasama Militer dengan ADF*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/12284531/tni.tunda.kerja.sama.militer.dengan.adf.australia> diakses pada 19 Juli 2017 Pukul. 14:46 Wib

<sup>11</sup> *Ibid.*,

nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional suatu bangsa. Serta dalam perspektif realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional.<sup>12</sup>

Asumsi dasarnya dalam perspektif realisme memandang negara sebagai aktor utama dimana negara mewakili unit analisis kunci dalam kajian hubungan antar unit unit ini. Dan juga negara sebagai aktor tunggal, dimana sebuah negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit terintegrasi untuk mengambil sebuah kebijakan, status ini tidak dapat dimiliki oleh aktor lainnya (aktor non negara). Negara sebagai aktor rasional dalam situasi pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas negara.<sup>13</sup>

Disisi lain Hubungan Internasional ditandai dengan anarkisme, dimana segala cara akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Hans J Morgenthau menyatakan bahwa *Super Power* adalah fokus utama hubungan internasional, *Power* adalah alat untuk mencapai

kepentingan nasional<sup>14</sup>. Perspektif Realis memiliki asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat

Asumsi yang kedua ialah dari pendekatan politik dan keamanan dengan cara menilai fungsi dan kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga ialah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Dalam penelitian ini yang bertindak ialah negara yang memiliki *power* untuk mencapai kepentingan nasional tersebut melalui kebijakan negara.

### **Teori**

Teori adalah suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional sehingga mampu membuat konsepualisasi dan konseptualisasi peristiwa peristiwa di masa lalu hingga masa kini. Teori berperan membekali peneliti untuk membangun interpretasi terhadap permasalahan yang kompleks dan memberikan cara untuk berpikir kritis, logis, dan integratif.<sup>15</sup>

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan **Teori Politik Luar Negeri** oleh **James N. Rossenau** mengkategorikan faktor-faktor/sumber sumber politik luar negeri suatu negara yaitu:

(1) Sumber sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara, pola-pola aliansi yang terbentuk

<sup>12</sup> M. Saeri, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatic..* Dalam Jurnal Transnasional Vol. 03 No.02, Februari 2012. Pekanbaru. Hal 568

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal 569-570

<sup>14</sup> Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace.* 1973. New York: Knopf. Hlm 25

<sup>15</sup> Scott Burchill, Andrew Linklater. *Teori Teori Hubungan Internasional.* Bandung; Nusa Media. 2008. hal 19

diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis;

(2) Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik;

(3) Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal;

(4) Sumber idiosinkratis (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai<sup>16</sup>.

## II. Isi

### Gambaran Umum Hubungan Indonesia dan Australia

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral

antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

Hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia terjalin dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial budaya, konsuleran dan ketenagakerjaan.

Hubungan Australia-Indonesia pada permulaan sangat baik, namun pada periode selanjutnya banyak mengalami pasang surut. Indonesia cenderung lebih banyak memberikan fokus kebijakan luar negerinya terhadap negara lain dibanding sahabat lamanya, Australia. Di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia menjadi penggagas Gerakan non-Blok. Kebijakan luar negeri Indonesia sampai pertengahan tahun 1960-an lebih banyak menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan Inggris dengan menarik perhatian Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia.

Ketika Suharto menggantikan Sukarno, kebijakan luar negeri lebih

<sup>16</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 21.

difokuskan pada negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Arab. Indonesia memandang hubungannya dengan Australia tidak terlalu penting. Pada sisi lain, Australia lebih memilih memfokuskan hubungan luar negerinya yang lebih substansial dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Amerika, meskipun ia menilai Indonesia mempunyai arti penting. Perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara yang terkandung dalam arah dan kebijakan luar negerinya menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi diantara kedua negara yang menimbulkan ketegangan dan konflik antara Indonesia-Australia.

Kekhawatiran akan ancaman dan keamanan juga turut menjadi beban Australia terhadap Indonesia sebagai negara tetangga. Posisi Indonesia yang berada di persimpangan jalur internasional dan dua benua, dua samudra serta jumlah penduduknya yang masuk dalam lima besar, menjadi sebuah hal yang penting bagi Australia untuk merancang kebijakan pertahanan keamanannya. Ketidakstabilan politik dalam negeri Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam Australia, yaitu melalui imigrasi orang-orang Indonesia ke wilayah Australia.

Persepsi ancaman yang datang dari Utara berawal dari kesadaran posisi demografis Australia yang terpencil di ujung belahan Selatan dunia. Ini memberikan konsekuensi bagi perancang keamanan untuk memberi prioritas yang lebih pada wilayah Utara, tidak ada ancaman lain yang datang kecuali dari arah Utara. Oleh karena itu, Australia memberikan perhatian terhadap Indonesia. Mereka memberi perhatian

khusus terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Australia memandang negara di sebelah Utara-nya sebagai buffer atau pelindungnya apabila ada serangan musuh dari Utara. Namun pada saat yang sama Australia juga memandang Indonesia sebagai ancaman.

Sikap saling curiga antara kedua negara mempengaruhi kadar hubungan mereka. Hal ini dikarenakan kebijakan pertahanan masing-masing untuk mempertahankan wilayahnya dianggap sebagai persiapan melancarkan serangan atau agresi ke pihak lain. Kepercayaan satu sama yang lain berkurang. Kurangnya kepercayaan menjadikan pondasi hubungan kedua negara rapuh.

### **Pengalaman Masa Lalu Indonesia (masalah Irian Barat dan Timor-Timur)**

Pada 1943 Australia bersama negara tetangganya Selandia Baru membuat sebuah kerjasama yang diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Herbert Evatt saat itu. Pada persiapan itu, Herbert Evatt mengatakan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Australia maupun Belanda, dilihatnya sebagai bagian integral dari apa yang disebut Zona Pasifik.<sup>17</sup> Adapun isi dari kerjasama antar negara tersebut mencakup pulau-pulau Timor, Irian, Kepulauan Solomons, Hebrida Baru, Fiji, dan Kaledonia Baru merupakan suatu garis pertahanan terdepan dari kedua negara.

---

<sup>17</sup> Kedua pemerintah menyetujui bahwa di dalam rangka suatu sistem umum keamanan dunia, suatu wilayah pertahanan, yang daerah mencakup barat daya dan Pasifik Selatan akan dibentuk dan bahwa zona ini harus dilandasi di Australia dan Selandia Baru, merentang melalui lingkungan pulau-pulau Utara dan Utara Timur laut Australia ke Selatan Samoa dan Kepulauan Cook.

Pada tanggal 6 Februari 1947 ditandatangani suatu perjanjian pembentukan Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission/CFC)<sup>18</sup> oleh Australia, Inggris, Perancis, dan Belanda. Negara-negara ini sebagai penanggung jawab wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri yang terletak sebelah selatan khatulistiwa dan termasuk Irian Barat di Canberra. Dalam pembentukan komisi tersebut secara jelas memasukkan Irian Barat sebagai wilayah Pasifik Selatan.

Elemen yang sangat penting dalam penilaian pemerintah Australia terhadap sengketa Irian Barat adalah kepentingan strategis kawasan itu dibagi pertahanannya. Merujuk pada hubungan Australia dengan Indonesia yang dipengaruhi masalah Irian Barat, sebenarnya disebabkan oleh pandangan dasar mereka tentang ancaman komunis dan pandangan mereka bahwa Indonesia akan menjadi negara yang ekspansionis.

Australia menolak klaim Indonesia atas Irian Barat berdasarkan alasan bahwa penduduk Irian Barat jauh berbeda secara asal usul etnis, bahasa, kebudayaan, sejarah dan agama bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia, karena penduduk New Guinea adalah Irian Barat, bukan indomelayu, mereka adalah penduduk pasifik bukan Samudera Hindia.

Masalah Timor-timur merupakan masalah yang juga krusial antara Indonesia dan Australia. Hal ini didasarkan dari dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor-timur yang padahal semula mendukung Indonesia.

Ditahun 1990-an, sikap Australia berubah, dengan memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Sikap pemebrian

<sup>18</sup> P.B. R. De Gues dan Martinus Nijhoff, op.cit., hlm. 56.

dukungan tersebut semakin jelas ketika Australia dibawah pemerintahan PM John Howard. Australia mulai menyatakan bahwa Timor Leste untuk jangka panjang harus merdeka. Australia mulai mengubah kebijakannya atas Timor Leste dengan dasar bahwa otonomi luas harus diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Timor Leste sebelum merdeka penuh.<sup>19</sup>

### **Dukungan Australia Terhadap OPM**

Sementara, kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif di dalam Papua memaksa beberapa warga Papua keluar meninggalkan negaranya. Inilah yang menjadi alasan utama 42 warga Papua meminta suaka Politik ke pemerintahan Australia pada tahun 2006. Mereka keluar dari Papua menggunakan perahu dan memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan di Indonesia. Mereka bertolak dari Merauke, berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York Australia.<sup>20</sup> Selanjutnya pada bulan Maret 2006, Departemen Imigrasi dan masalah-masalah penduduk asli Australia (DIMIA) memberikan Temporary Protection Visa (visa tinggal sementara) kepada 42 dari 43 warga Papua yang mencari suaka. Dengan demikian keputusan Australia di atas sangat melecehkan Papua dalam integritas NKRI.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah Australia tersebut bukan tanpa alasan, karena Papua dalam kacamata Australia memiliki nilai strategis sebagai *buffer zone* bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Kompas, "Visa Australia dan Penanganan Papua", 24 Maret 2006, <http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm> diakses pada 4 Agustus 2017 Pukul. 14 :12

itu Australia merasa lebih aman jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia daripada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

### **Masalah Imigran dan *Asylum Seeker***

Masuknya pengungsi pencari suaka ke Australia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan di negara asalnya adalah sah dan diperbolehkan oleh hukum internasional, karena negara tujuan tersebut telah menerima dan mengakui Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 yang diimplimentasikan dalam Undang-Undang Imigrasi Australia. Tindakan penolakan atas masuknya pencari suaka dengan menggunakan sarana laut/kapal atau perahu oleh angkatan laut Australia dapat dibenarkan karena kedatangan pencari suaka dapat dianggap memasuki perairan wilayah Australia tanpa izin atau memasuki wilayah negara tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang ditetapkan oleh Australia.<sup>21</sup>

Posisi geografis Indonesia yang startegis terletak di antara Benua Asia dan Australia merupakan tempat transit bagi mereka para imigran pencari suaka (*asylum seekers*) yang akan menyeberang menuju ke Australia.

Yang menjadi masalah ialah ketika status Indonesia hanya sebagai negara transit, akan tetapi Australia malah membalikan situasi dimana para pencari suaka dan imigran disuruh kembali ke perairan Indonesia ketika mereka sampai di perairan Australia.

---

<sup>21</sup> Sukmayudha, Analisis Hukum Atas Diusirnya Imigran, <http://www.sukmayudha.tk/2015/02/>, diakses 20 Juli 2017, pukul 13.00 WIB

### **Kasus Penyadapan dan *Bali Nine***

Laporan yang ditulis oleh Snowden mengenai aksi penyadapan Australia itu adalah bagian dokumen yang membicarakan mengenai adanya misi spionase, yang dinamakan Lima Mata (*5 eyes club*), yang disponsori oleh Amerika Serikat, dan beranggotakan : Australia, Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan New Zealand. Spionase adalah: “*the practice of using spies to collect information about what another government or company is doing or plans to do*”.<sup>22</sup>

Kelima negara tersebut saling berbagi informasi mengenai data intelijen berdasarkan Australian Secret Intelligent Service dari Kedutaan Besar Australian di Jakarta dengan tujuan mendapatkan dan mengumpulkan data intelijen Indonesia.<sup>23</sup>

Australia telah melakukan penyadapan percakapan telpon terhadap sejumlah pejabat Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2009 dan baru terkuak pada tahun 2013. Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.<sup>24</sup>

***Bali Nine*** adalah sebutan yang diberikan media massa kepada Sembilan orang Australia yang ditangkap

---

<sup>22</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* Ninth Edition

<sup>23</sup> Vivanews, 8 November 2013, Spionase Kangguru di Tanah Garuda, dalam <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kangguru-di-tanah-garuda>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017 Pukul. 12:43 Wib

<sup>24</sup> *BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007*, dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia) diakses pada 8 Agustus 2017 Pukul. 12:27 Wib

pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2006 kepada dua gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menuai aksi protes perdana menteri Australia Tony Abbot dan masyarakat Australia karena dianggap melanggar HAM.

Ketika permohonan grasi telah diajukan ke Presiden, Presiden Joko Widodo saat itu pada tahun 2015 menolak permohonan grasi tersebut. Pasca penolakan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo, pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman akhirnya dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Kedua terpidana merupakan warga negara Australia yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 dengan ancaman hukuman mati.

Reaksi pertama Perdana Menteri Tony Abbott adalah menarik duta besar mereka di Indonesia. Pemerintah Australia bahkan menyinggung mengenai pemberian bantuan berupa uang dan sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana tsunami yang menimpa Indonesia pada tahun 2004.

### **Kasus Pelecehan dan Penghentian Kerjasama Pertahanan Sementara *Joint Training dan Joint Military***

Setelah beberapa tahun ketegangan hubungan Indonesia dan Australia seperti saat kasus penyadapan, kasus eksekusi mati *Duo Bali Nine*, dan lain sebagainya. Australia nyatanya tidak berhenti menyerang Indonesia dengan jalan-jalan yang tidak biasa serta menyulut konflik. Pada akhir tahun 2016 lalu, dalam kerangka kerja

latihan militer bersama, Korps Pasukan Khusus Indonesia atau Koppasus telah menemukan materi-materi yang diajarkan di tentara Australia yang bersifat melecehkan dan menghina Indonesia.<sup>25</sup>

Adapun materi-materi yang ditemukan tersebut ialah memuat kritik terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur, selain itu tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal, kemudian terdapat materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk, ditambah dengan materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh militer Australia, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat "lima prinsip gila".<sup>26</sup> Menanggapi kasus ini, Indonesia merespon dengan sangat keras dengan menghentikan berbagai kerjasama pertahanan sementara dengan Australia.

Kasus tersebut selanjutnya direspon dengan serius oleh Indonesia. Indonesia memberikan respon dengan menghentikan kerjasama sementara, kerja sama di segala aspek, termasuk kerja sama teknis serta pelatihan militer antara kedua negara.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Panglima: Australia Melesetkan Pancasila Menjadi Pancagila, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170105123300-20-184262/panglima-australia-melesetkan-pancasila-jadi-pancagila/> diakses pada 9 Agustus 2017 Pukul. 13:40 Wib

<sup>26</sup> *Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia*, pada <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/01/04/120832607/ini-materi-pelatihan-militer-australia-yang-hina-indonesia> diakses pada 9 Agustus 2017 Pukul. 13:28 Wib

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Penghentian kerjasama ini bukan hal baru, hal ini disebabkan karena pada November 2013, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, Indonesia telah menghentikan setidaknya tiga kerja sama militer dengan Australia, terkait tuduhan penyadapan terhadap sejumlah pejabat penting Indonesia.<sup>28</sup>

*Direktur Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS)* Mufti Makarim yang dihubungi secara terpisah mengatakan, sikap militer Australia yang masuk ranah diskursus politik di Indonesia dinilai tidak tepat. Pasalnya, pembahasan dalam kerja sama militer kedua negara dibatasi dalam hal mengatasi ancaman militer semata.<sup>29</sup>

Pembicaraan negatif tentang politik Indonesia dalam forum pendidikan antarpasukan khusus Indonesia dan Australia tentu menyinggung semangat saling menghormati sehingga kerja sama militer Indonesia-Australia patut dihentikan sementara. Sementara itu, dalam Surat Telegram Nomor 1545 Tahun 2016 pada 29 Desember 2016, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk menghentikan sementara segala kerja sama militer, termasuk latihan dengan ADF.<sup>30</sup>

### III. Simpulan

Krisis yang terjadi antara Indonesia dan Australia yang terjadi berulang-ulang dan datang dengan masalah yang berbeda-beda juga. Pasang surut hubungan Indonesia-

Australia telah berlaku sejak kemerdekaan Indonesia dimana Australia hadir sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Akan tetapi, keunikan dari hubungan Indonesia dan Australia dapat dilihat dari kebijakan Australia yang mendukung lepasnya Timor-timur dan mendukung kemerdekaan Irian Barat. Seiring berjalannya waktu, hubungan bilateral semakin membaik dikarenakan masalah-masalah dunia saat ini yang sangat kompleks.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 hubungan Indonesia kembali memanas dengan adanya kasus masuknya kapal perang Australia di perairan Indonesia, kasus aparat Australia yang mencegat kapal pengungsi dengan membayar kapten dan awak untuk dikirim lagi ke Indonesia, dan yang terakhir kasus penyadapan yang dilakukan intelijen Australia.

Hal tersebut jelas merupakan masalah, namun, Indonesia merupakan negara yang bukan ofensif dalam mengambil sebuah kebijakan terlebih Indonesia memiliki kepentingan nasional yang besar di Australia. Tidak mudah untuk mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatic.

Pada Oktober 2016, Kementerian Pertahanan Australia bersama Kementerian Pertahanan Indonesia membahas tentang penguatan kerjasama yang diatur dalam beberapa kesepakatan bersama terkait upaya meningkatkan dan memperkuat hubungan kedua negara dalam kerjasama luar negeri dan kerjasama pertahanan diantaranya kerjasama di bidang keamanan maritim, kerjasama kontra terorisme, kerjasama di bidang pasukan penjaga perdamaian, kerjasama industri pertahanan dan kerjasama di bidang keamanan cyber.

Pada beberapa waktu setelah itu, Pemerintah Indonesia melalui

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *TNI Tunda Kerjasama Militer dengan Australia*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/12284531/tni.tunda.kerja.sama.militer.dengan.adf.australia> diakses pada 10 Agustus 2017 Pukul. 13:31

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Kementrian Pertahanan sepakat untuk menghentikan kerjasama pertahanan dengan Australia. Baik itu kerjasama TNI dan *Australian Defense Force, Joint Training, Joint Operation* Kopassus, dan sebagainya sementara dibekukan. Hal ini merupakan respon atas isu penghinaan Pancasila oleh angkatan Australia.

Kedekatan Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang bertetangga membuat hubungan antar negara semakin berkembang. Perkembangan hubungan dan kerjasama ini ditandai dengan kerjasama pertahanan antar dua negara. Kerjasama pada tingkat pertahanan merupakan kerjasama yang menandai bahwa kedua negara tersebut berhubungan sangat baik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain.

Walaupun hubungan Indonesia dan Australia diwarnai dengan panas-dingin sebuah hubungan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan kedua negara untuk tetap menjaga hubungan yang baik dan harmonis terlepas kedua negara tersebut memiliki kepentingan terselubung.

Kerjasama pertahanan yang termasuk dalam kerangka kerjasama Indonesia dan Australia merupakan salah satu agenda yang penting. Hal ini dikarnakan kerjasama pertahanan diwujudkan dalam bentuk latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antarpejabat. Agenda ini terus berjalan dari waktu sejak kerjasama dibuka.

Setelah beberapa tahun ketegangan hubungan Indonesia dan Australia seperti saat kasus penyadapan, kasus eksekusi mati *Duo Bali Nine*, dan lain sebagainya. Australia nyatanya tidak berhenti menyerang Indonesia dengan jalan-jalan yang tidak biasa serta menyulut konflik. Pada akhir tahun 2016 lalu, dalam kerangka kerja latihan militer bersama, Korps Pasukan

Khusus Indonesia atau Koppasus telah menemukan materi-materi yang diajarkan di tentara Australia yang bersifat melecehkan dan menghina Indonesia.

Adapun materi-materi yang ditemukan tersebut ialah memuat kritik terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur, selain itu tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal, kemudian terdapat materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk, ditambah dengan materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh militer Australia, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat "lima prinsip gila". Menanggapi kasus ini, Indonesia merespon dengan sangat keras dengan menghentikan berbagai kerjasama pertahanan sementara dengan Australia.

Indonesia mengambil langkah untuk menghentikan kerjasama pertahanan sementara dengan Australia karena hal ini dianggap telah melecehkan kehormatan Bangsa Indonesia. mengapa hal seperti ini terjadi, hal ini disebabkan karena hubungan antara Indonesia dan Australia yang selalu pasang surut, gejala politik luar negeri, dan lain sebagainya yang menjadi faktor belum terikat kuatnya hubungan kedua negara.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

A.Kardiyat Wiharyanto, Masa Kolonial Belanda 1800-1825. Dalam [http://eprints.dinus.ac.id/14367/1/%5BMateri%5D\\_A.\\_Kardiyat\\_Wiharyanto\\_-](http://eprints.dinus.ac.id/14367/1/%5BMateri%5D_A._Kardiyat_Wiharyanto_-)

\_MASA\_KOLONIAL\_BELAND  
A.pdf diakses pada 23 Januari  
2017 Pkul. 20:50

Awang Munawar. Kajian Ekonomi Politik Internasional Tentang Hubungan Antara Dinamika pasar yang berkaitan dengan pasar tingkat domestic maupun internasional: dalam Jurnal online TransBORDER, Vol 1.No.1

Joyner, Christopher C. and Tamara Cofman Wittes. International systems and U.S. Policy: Threat and Respon. Current World Leaders, vol. 39, Agustus 1996

M. Saeri, Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatic. Dalam Jurnal Transnasional Vol. 03 No.02, Februari 2012

Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D, “Signifikansi Perjanjian Lombok bagi Hubungan Indonesia dan Australia, SATRIA Studi Pertahanan Vol.4 No.4 (Oktober – Desember 2008),

Soemadi D.M  
Brotodiningrat, Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancan Global: Sebuah Refleksi, Jurnal Diplomasi Vol. 4 No.1, Maret 2012 ISSN: 2085-6075

#### Buku

Adriana Elisabeth, dkk., 2008, *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta, LIPI Press

Anak Agung Banyu Perwira & Yanyang Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan internasional*. Remaja Rosdakary; Bandung

Anthony Reid & Martin O’Hare, 1955. Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: PT Hramedia Pustaka Utama.

Brown Chris, 2001. Understanding International Relations, second edition., New York: Palgrave

Burchill Scott, 2008. Andrew Linklater. Teori Teori Hubungan Internasional. Bandung; Nusa Media

Cipto, Bambang, 2007. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Hadi Soebadio, 2002. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf.

J. Siboro, 1989. *Sejarah Australia*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPLPTK

James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

M. Cholil, 1971. *Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar ilmu Politik*. Jakarta; gramedia pustaka.

#### Dokumen Resmi

Australian Government: Australia Customs and Border Protection Service, Operation Sovereign Borders, tersedia di: <http://www.customs.gov.au/site/operation-sovereignborders.asp> [diakses 20 Juli 2017]

*Buku Diplomasi Indonesia Tahun 2011*  
– Kementerian Luar Negeri,  
diunduh dalam  
[www.kemlu.go.id/Buku/Buku%  
20Diplomasi%20Indonesia%202  
011.pdf](http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf) diakses pada 20 Juli  
2017 Pukul. 13:20 Wib.

Buku Petunjuk Induk tentang Latihan  
Tentara Nasional Indonesia,  
diunduh dalam  
[http://www.pusdikif.mil.id/pusdi  
kif/upload/refrensi/Buku%20Pet  
unjuk/Bujukin/Bujukin%20Latih  
an.pdf](http://www.pusdikif.mil.id/pusdikif/upload/refrensi/Buku%20Petunjuk/Bujukin/Bujukin%20Latihan.pdf) diakses pada 8 Agustus  
2017 Pukul. 14:50 Wib

Direktif Menko Polhukam Nomor Dir-  
01/MENKO/POLHUKAM/2013  
tentang Penanggulangan  
Penyelundupan Manusia,  
Pengungsi dan Pencari Suaka di  
Indonesia, Nopember 2013.

Buletin La'õ Hamutuk, ” *Latar  
Belakang Sejarah Laut Timor*  
”, Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus  
2003.

Chapter 10, The Higher Command  
Structure for Joint ADF  
Operations, East Timor—  
INTERFET  
[http://epress.anu.edu.au/sdsc/hap  
/mobile\\_devices/ch10s08.html](http://epress.anu.edu.au/sdsc/hap/mobile_devices/ch10s08.html)  
diakses pada tanggal 9 Agustus  
2017 Pukul. 11:38 Wib

### **Internet**

*AL Australia Bayar awak perahu  
migran, Abbot tidak bantah.*  
Dalam  
[http://www.bbc.com/indonesia/d  
unia/2015/06/150612\\_dunia\\_abb  
ott\\_pengungsi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150612_dunia_abbott_pengungsi) diakses pada 29  
Januari 2017 Pukul 21:26 Wib

*BIN: Australia Menyadap Indonesia  
Sejak 2007,* dalam  
[http://www.bbc.com/indonesia/b  
erita\\_indonesia/2013/11/131120  
\\_bin\\_sadap\\_australia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia) diakses

pada 8 Agustus 2017 Pukul.  
12:27 Wib